

# LAPORAN KEUANGAN

PERIODE SEMESTER I  
TAHUN ANGGARAN 2023

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA  
PENGAMBENGAN

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan  
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Keputusan, Juli 2023

Mannojengi, S.St.Pi, M.Si  
19750417 200212 1 002

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran dan Daftar	

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jemberana, Juli 2023



Mannojengi, S.St.Pi, M.Si  
19750417 200212 1 002

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Semester 1 Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester 1 TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 497.430.296,- atau mencapai 95 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 526.050.000,-

Realisasi Belanja Negara pada periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 7.463.872.357,- atau mencapai 40 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 18.568.021.000,-

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 115.739.951.666,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 382.434.787,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 115.333.359.274,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 24.157.605,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 923.438.892,- dan Rp 114.816.512.774,-.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 183.342.354,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 6.707.149.282,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 6.523.806.928,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 89.790.673,- dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 6.434.016.255,-).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 114.347.484.191,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 6.434.015.493,-kemudian ditambah dengan selisih revaluasi Aset tetap Rp 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 6.966.442.061,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp 114.816.512.774,-.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	526,050,000	497,430,296	94.56	557,977,519
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>526,050,000</b>	<b>497,430,296</b>	<b>94.56</b>	<b>557,977,519</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	5,191,659,000	2,555,563,023		2,126,312,408
Belanja Barang	B.4	9,933,125,000	3,755,908,456		2,546,582,937
Belanja Modal	B.5	3,443,237,000	1,152,400,878		899,196,193
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>18,568,021,000</b>	<b>7,463,872,357</b>	<b>40.20</b>	<b>5,572,091,538</b>

## II. NERACA

### PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN NERACA PER 30 Juni 2023 DAN 31 Desember 2022

*(DalamRupiah)*

URAIAN	CATATAN	DESEMBER 2022	DESEMBER 2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	248,517,000	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	6,852,121	
Piutang Bukan Pajak	C.4	116,092,548	274,681,139
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNB	C.7	(1,373,406)	(1,373,406)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	106,838,155
Persediaan	C.10	11,575,550	9,730,000
Jumlah Aset Lancar		381,663,813	389,875,888
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13		
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	53,041,581,000	53,041,581,000
Peralatan dan Mesin	C.15	16,093,487,796	15,937,533,716
Gedung dan Bangunan	C.16	23,971,897,873	23,971,897,873
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	132,516,273,186	132,544,571,186
Aset Tetap Lainnya	C.18	226,726,000	226,726,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	1,013,865,628	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(111,544,472,209)	(111,564,768,479)
Jumlah Aset Tetap		115,319,359,274	114,157,541,296
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21		
Aset Lain-Lain	C.22	22,492,189,000	22,448,391,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(22,468,031,395)	(22,447,735,125)
Jumlah Aset Lainnya		24,157,605	655,875
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>115,725,180,692</b>	<b>114,548,073,059</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	248,517,000	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	318,713,223	30,329,136
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	137,287,737	
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.27	-	
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	218,920,932	170,259,732
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		923,438,892	200,588,868
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>923,438,892</b>	<b>200,588,868</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
Ekuitas Dana Lancar	C.29		
Ekuitas Dana Investasi	C.30		
Ekuitas	C.31	114,801,741,800	114,347,484,191
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>114,801,741,800</b>	<b>114,347,484,191</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>115,725,180,692</b>	<b>114,548,073,059</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 DAN 30 Juni 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUNI 2023	JUNI 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	183,342,354	587,032,147
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>183,342,354</b>	<b>587,032,147</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	2,717,122,125	2,532,142,380
Beban Persediaan	D.3	19,513,970	12,369,750
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,661,222,392	2,110,030,379
Beban Pemeliharaan	D.5	422,259,617	378,860,953
Beban Perjalanan Dinas	D.6	887,332,758	432,100,047
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	11,996,952,392
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(301,580)	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>6,707,149,282</b>	<b>17,462,455,901</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(6,523,806,928)</b>	<b>(16,875,423,754)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	7,999,999
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	(536,862,733)
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		89,790,673	12,312,700
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>89,790,673</b>	<b>557,175,432</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(6,434,016,255)</b>	<b>(16,318,248,322)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(6,434,016,255)</b>	<b>(16,318,248,322)</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 DAN 2022

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	JUNI 2023	JUNI 2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	114,347,484,191	131,476,157,703
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6,434,016,255)	(16,318,248,322)
<b>PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN</b>		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>		(63,397,985)	(566,287,504)
<b>LAIN-LAIN</b>			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluai	E.5	(55,544,613)	(536,862,733)
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	(7,853,372)	(29,424,771)
KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.7		
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>		6,966,442,061	5,899,558,691
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		469,027,821	(10,984,977,135)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.8	<b>114,816,512,012</b>	<b>120,491,180,568</b>

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

*Dasar Hukum*  
*Entitas dan*  
*Rencana*  
*Strategis*

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (PPNP) awal mulanya adalah PPI Pengembangan yang dibangun pada tahun 1976/1977. Pada Tahun 1988 dilakukan study kelayakan oleh Fisheries Infrastructure Sector Project dengan Consultant Roger Consulting Marine Gmbh. Sejak Tahun 2000 dilakukan pembangunan fasilitas dermaga dan breakwater. Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor : B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005. Hal Penataan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, ditingkatkan kelasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Pengembangan dan ditetapkan menjadi eselon IVa.

Kemudian, berdasarkan Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor : B/2672/M.PAN/9/2008 tanggal 11 September 2008 ditingkatkan lagi kelasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dan ditetapkan menjadi eselon IIIa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/MEN/2008 tanggal 6 Oktober 2008.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan terletak pada posisi 080 23' 46" Lintang Selatan dan 1140 34' 47" Bujur Timur, terletak di Jl. Pelabuhan No. 1 Desa Pengembangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi BALI. Berjarak 9 KM dari Kota Negara dan 105 KM dari Kota Denpasar, menghadap ke Samudera Hindia dan

Selat Bali.

Formulasi Implementasi rencana strategis (RENSTRA) digunakan sebagai penuntun pelaksanaan strategi yang terpilih dalam mendukung visi dan misi serta memperhatikan sasaran jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang ditetapkan oleh PPN Pengambangan.

Visi PPN Pengambangan dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah **”PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN EKONOMI PERIKANAN TERPADU TAHUN 2023”**

PPN Pengambangan dipandang sebagai sentra yang berfungsi sebagai motor dalam pengembangan dan pembangunan khususnya sektor kelautan dan perikanan di wilayah Propinsi Bali.

Pengembangan ekonomi perikanan, menyiratkan seluruh kegiatan yang berlangsung di PPN Pengambangan mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan ikan sampai pemasaran hasil perikanan serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Misi yang diemban PPN Pengambangan :

1. Meningkatkan fasilitas dan fungsi pelabuhan perikanan yang dapat menampung kegiatan perikanan secara efisien, efektif, bertanggungjawab, lestari dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di PPN Pengambangan serta pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan.
3. Mendorong peningkatan nilai produksi, pengolahan, pengawasan hasil perikanan serta investasi.
4. Menyediakan informasi, IPTEK serta data kelautan dan

perikanan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah

basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah	

	<p>diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</p>	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak

berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

### *Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis  
Akrual  
Pertama Kali*

**(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan

penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dipenuhi.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak empat kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp. 18.568.021.000,- setelah revisi terakhir menjadi Rp. 18.568.021.000,-. Tidak adanya perubahan jumlah total pagu akan tetapi karena adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Sehingga pagu anggaran terlihat dalam tabel berikut:

Uraian	2022	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa Pelabuhan	199,170,000	199,170,000
Pendapatan Sarana dan Prasarana	326,880,000	326,880,000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>526,050,000</b>	<b>526,050,000</b>
Belanja		
Belanja Pegawai	5,191,659,000	5,191,659,000
Belanja Barang	9,933,125,000	9,933,125,000
Belanja Modal	3,443,237,000	3,443,237,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>18,568,021,000</b>	<b>18,568,021,000</b>

### *Realisasi* **B.1 Pendapatan**

*Pendapatan* Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 497.430.296,- atau mencapai 95 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 526.050.000,- *Pendapatan* Pendapatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan terdiri dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan, dan Pendapatan Jasa Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	326,880,000	91,425,820	27.97
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	199,170,000	312,278,803	156.79
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	38,181,060	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	55,544,613	-
<b>Jumlah</b>	<b>526,050,000</b>	<b>497,430,296</b>	<b>94.56</b>

Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi senilai Rp91.425.820,- merupakan pendapatan yang berasal dari sewa bangunan, lahan, sarana dan prasarana. Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan senilai Rp312.278.803,- merupakan pendapatan dari pas masuk, tambat labuh, penggunaan air, es, cool storage dan jasa kebersihan. Sedangkan penerimaan kembali belanja barang senilai Rp38.181.060,- merupakan pendapatan dari kelebihan pembayaran belanja bahan dan honorarium PPK tahun 2022. serta penerimaan kembali belanja modal senilai Rp55.544.613,- merupakan pendapatan dari kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan gedung pelayanan terpadu tahap 2 pada PPN Pengambengan an. CV. Putra Catur Dewata. Bukti setor penerimaan kembali belanja barang/modal sebagaimana terlampir.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	-	7,999,999	-100.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	91,425,820	275,706,361	-66.84
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	312,278,803	261,958,459	19.21
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	38,181,060	177,700	21386
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	55,544,613	12,135,000	358
<b>JUMLAH</b>	<b>497,430,296</b>	<b>557,977,519</b>	<b>-10.85</b>

*Realisasi* **B.2 Belanja**

*Belanja*

*Negara*

*Rp*

*7.463.872*

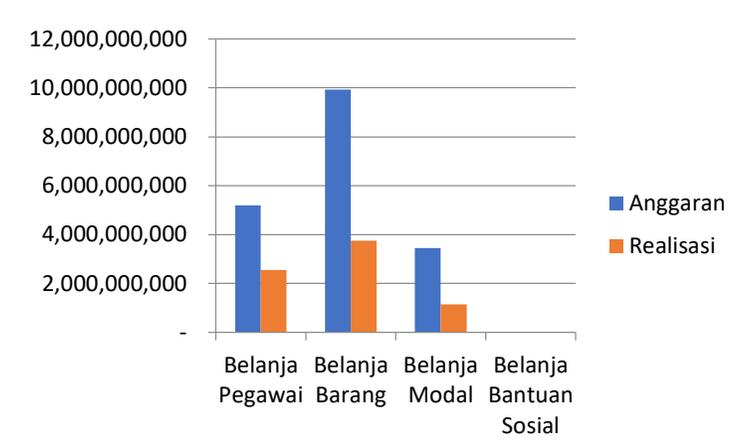
*.357*

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp 7.463.872.357,- atau 40% dari anggaran belanja sebesar Rp 18.568.021.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023*

URAIAN	Tahun 2023		
	Anggaran	REALISASI	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	5,191,659,000	2,555,563,023	49.22%
Belanja Barang	9,933,125,000	3,755,908,456	37.81%
Belanja Modal	3,443,237,000	1,152,400,878	33.47%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00%
<b>Jumlah</b>	<b>18,568,021,000</b>	<b>7,463,872,357</b>	<b>40.20%</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 33,95% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI JUNI 2023	REALISASI JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,555,563,023	2,126,312,408	20.19
Belanja Barang	3,755,908,456	2,546,582,937	47.49
Belanja Modal	1,152,400,878	899,196,193	28.16
Belanja Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7,463,872,357</b>	<b>5,572,091,538</b>	<b>33.95</b>

**B.3 Belanja Pegawai**

*Belanja Pegawai* Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.555.563.023,- dan Rp 2.126.312.408,-. *Rp2.555.563.023* Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi

belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 20,19 persen dari TA 2022.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,315,103,790	1,100,702,350	19.48
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	123,043,230	92,789,990	32.60
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	15,193,000	11,625,000	30.69
Belanja Vakasi	-	-	-
Belanja Tunj Khusus & Belanja Pegawai Transit	1,102,778,159	921,195,340	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2,556,118,179</b>	<b>2,126,312,680</b>	20.21
Pengembalian Belanja Pegawai	(555,156)	(272)	204,001.47
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2,555,563,023</b>	<b>2,126,312,408</b>	20.19

*Belanja* **B.4 Belanja Barang**

*Barang*  
*Rp3.755.*  
*908.456*

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.755.908.456,- dan Rp 2.546.582.937,- Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 25,41 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh bertambahnya belanja barang operasional dan jasa yang cukup signifikan.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	722,068,416	726,933,025	(0.67)
Belanja Barang Non Operasional	396,779,000	127,941,620	210.13
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25,294,520		
Belanja Jasa	1,389,893,052	1,032,121,578	34.66
Belanja Pemeliharaan	422,259,617	286,267,867	47.51
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	799,613,851	365,064,047	119.03
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3,755,908,456</b>	<b>2,546,582,937</b>	<b>47.49</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3,755,908,456</b>	<b>2,546,582,937</b>	<b>47.49</b>

### **B.5 Belanja Modal**

*Belanja Modal Rp 1.152.400.878* Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.152.400.878,- dan Rp Rp 899.196.193,- . Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2022 disebabkan karena adanya pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di PP Perintis, serta pembangunan pagar, tempat parkir, taman dan peningkatan gedung pelayanan terpadu di PPN Pengambangan.

#### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp158.814.080,- dan Rp276.499.200,- Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami penurunan dibandingkan TA 2022.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Laptop	68,398,200	0	100.00
Mini Lab	15,595,500	0	100.00
Meubelair Kantor	42,999,180	195,250,000	-77.98
AC	31,821,200	43,249,200	-26.42
Kendaraan Pengangkut Sampah (roda 3)	0	38,000,000	-100.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>74,820,380</b>	<b>276,499,200</b>	<b>-72.94</b>

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp622.696.993,- dan Rp622.696.993,-.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	712,977,404	72,552,000	0.00
Penambahan Nilai Gedung dan Banguna	203,323,480	550,144,993	-63.04
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>916,300,884</b>	<b>622,696,993</b>	<b>0.00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>916,300,884</b>	<b>622,696,993</b>	<b>47.15</b>

Realisasi belanja gedung dan bangunan pada TA 2023 merupakan pekerjaan Pembangunan Pagar, Tempat Parkir, Taman serta Peningkatan Gedung Pelayanan Terpadu dengan rincian sebagai berikut :

NO	SPM		PENGGUNAAN	NILAI
	NOMER	TANGGAL		
1	00060	27-02-2023	Konsultan Perencana Pembangunan Pagar Besi	11,664,476
2	00061	27-02-2023	Konsultan Perencana Pembangunan Tempat Parkir Roda 2 dan 4 Kantor Pelayanan Terpadu	14,417,817
3	00062	28-02-2023	Konsultan Perencana Pembangunan Taman Kantor Pelayanan Terpadu	14,652,135
4	00063	28-02-2023	Konsultan Perencana Pembangunan Pagar Alas Kantor Pelayanan Terpadu Berdasarkan	21,425,707
	00172	02-05-2023	Konsultan Perencana Peningkatan Gedung Pelayanan Terpadu Sesuai Kontrak B.1636/PPN.PGB/KP.440/III/2023 Tgl 31 Mart 23	13,693,609
	00210	12-05-2023	GUP	3,680,000
	00227	24-05-2023	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pagar Alas Kantor Pelayanan Terpadu Untuk 3 Orang Berdasarkan SK Nomor 37/KPA/OT.210/I/2023 Tanggal 5 Januari 2 023	2,550,000
	00229	24-05-2023	Pembangunan Pagar Besi Kantor Pelayanan Terpadu sesuai Kontrak B.1522/PPN.PGB/KP.440/III/2023 Tgl 24 Maret 23	156,140,450
	00238	30-05-2023	GUP	1,542,000
	00309	27-06-2023	PTUP	217,383,102
	00245	05-06-2023	Pembangunan Tempat Parkir Roda 2 dan 4 Kantor Pelayanan Terpadu Sesuai Kontrak B.1481/PPN.PGB/KP.440/III/2023 Tgl 20 Maret 23	199,099,717
	00246	05-06-2023	Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir Roda 2 dan 4 Kantor Pelayanan Terpadu Sesuai Kontrak B.1503/PPN.PGB/KP.440/III/23 Tgl 20 Maret 23	9,762,000
	00247	05-06-2023	Pengawasan Pembangunan Pagar Besi Kantor Pelayanan Terpadu Sesuai Kontrak B.1535/PPN.PGB/KP.440/III/2023 Tgl 24 Maret 2023	7,670,000
	00293	19-06-2023	Uang Muka Pembangunan Pagar Alas Kantor Pelayanan Terpadu sesuai Kontrak B.2415/PPN.PGB/KS.320/V/2023 Tgl 26 Mei 2023	61,800,000
	00302	22-06-2023	GUP	180,819,871
5				
<b>TOTAL</b>				<b>916,300,884</b>

#### ***B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan***

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi , dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A. 2022	NAIK (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp77.285.914 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	77,285,914	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Belanja Modal Lainnya merupakan konsultan perencana pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di PP Perintis.

### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

*Belanja  
Bantuan  
Sosial  
Rp0*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Sosial	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp248.517.000*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 248.517.000,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	TH 2022	TH 2022
Saldo UP	78,327,578	-
Kuitansi UP Belum di SPJ-kan	41,672,422	-
Saldo TUP	59,841,685	-
Kuitansi TUP Belum di SPJ-kan	68,675,315	-
<b>Jumlah</b>	<b>248,517,000</b>	<b>-</b>

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp 0*

### **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
PT. BRI (Persero) Tbk, Cabang Negara	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya  
dan Setara Kas  
Rp6.852.121*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.852.121 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	6,852,121	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6,852,121</b>	<b>-</b>

*Piutang PNB*

*Rp116.092.548*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 116.092.548 dan Rp 274.681.139,- Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB

Uraian	TH 2023	TH 2022
Piutang PNB	116,092,548	180,955,463
Piutang Lainnya	-	93,725,676
<b>Jumlah</b>	<b>116,092,548</b>	<b>274,681,139</b>

Terdapat beberapa piutang pada tanggal pelaporan per 30 Juni 2023 belum dilakukan pelunasan sebagaimana rincian piutang terlampir.

*Bagian Lancar*

*Tagihan TP/TGR*

*Rp0*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2023 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2018*

No	Nama	Tahun 2023	Tahun 2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar  
TPA  
Rp0*

### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA*

No	Nama	TH 2021	TH 2020
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Lancar  
Rp -602.432*

### **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp -602.432 dan Rp -1.373.406. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

### Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar		0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

### Beban Dibayar di Muka Rp0

### C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

#### Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

### Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

### C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp106.838.155.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun

belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus  
Diterima TA 2023 dan 2023*

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pendapatan Jasa Pelabuhan	-	106,838,155
Pendapatan Jasa Pelabuhan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>106,838,155</b>

*Persediaan*

*Rp11.575.550*

**C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 11.575.550,- dan Rp.9.730.000,-. Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 terdiri dari saldo awal Rp.9.730.000,- ditambah pembelian belanja Rp.25.294.520,- dikurangi pengeluaran Rp. 23.448.970,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*

Jenis	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	11,575,550	9,730,000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>11,575,550</b>	<b>9,730,000</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan*

*TP/TGR*

*Rp0*

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022*

No	Debitur	Tahun 2021	Tahun 2020
1		-	-
2		-	-
3		-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

**C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA*

No	Debitur	TH 2021	TH 2020
1		-	-
2		-	-
3		-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Penyisihan  
Piutang Tak*

**C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

*Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-	-	-

*Tanah  
Rp53.041.581.000*

**C.14 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 53.041.581.000,- dan Rp 53.041.581.000,-. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>53,041,581,000</b>
Mutasi tambah:	0
<b>Pembelian</b>	<b>0</b>
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 30 Juni 2020</b>	<b>53,041,581,000</b>

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	121.580 m2	Jl. Pelabuhan No.1 Pengambangan Kec. Negara	53,041,581,000
<b>Jumlah</b>			<b>53,041,581,000</b>

*Peralatan dan  
Mesin*

*Rp16.093.487.796*

**C.15 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp16.093.487.796,- dan Rp15.937.533.716,-. Terdapat mutasi kurang berupa transfer keluar satu unit forklift ke Pelabuhan Perikanan Merauke. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>15,937,533,716</b>
Mutasi tambah:	<b>180,977,880</b>
Pembelian dan Reklas Masuk	180,977,880
Mutasi kurang:	<b>(25,023,800)</b>
Penghapusan dan Reklas Keluar	(287,439,500)
<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>	<b>16,093,487,796</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(13,772,927,104)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2023</b>	<b>2,320,560,692</b>

Mutasi Tambah atas nilai peralatan dan mesin senilai Rp 180.977.880,- berasal dari :

a. Pembelian berupa :

- 5 Unit Rak Besi senilai Rp. 15.648.780
- 4 Unit Kursi Besi/Metal senilai Rp. 19.802.400
- 1 Unit Meja Rapat senilai Rp. 17.071.800

- 4 Unit A.C. Split senilai Rp. 31.821.200
- 6 Unit Lap Top senilai Rp. 68.398.200
- 1 Unit Printer senilai Rp. 12.640.000

Mutasi Kurang atas nilai peralatan dan mesin senilai Rp 25.023.800,- berasal dari :

b. Reklas Keluar berupa :

- 1 Unit Meja Rapat senilai Rp. 9.523.800

### C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp  
23.971.897.873*

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp 23.971.897.873,- dan Rp 23.971.897.873,-. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada tanggal pelaporan

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>23,971,897,873</b>
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>	<b>23,971,897,873</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(1,798,316,896)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2023</b>	<b>22,173,580,977</b>

### C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi  
Rp132.544.571.186*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp132.544.571.186,- dan Rp132.544.571.186,-. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada tanggal pelaporan

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>132,544,571,186</b>
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>	<b>132,544,571,186</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(95,815,572,479)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2023</b>	<b>36,728,998,707</b>

*Aset Tetap*

*Lainnya*

*Rp226.726.000*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp 226.726.000 dan Rp 226.726.000. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada tanggal pelaporan

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>226,726,000</b>
Mutasi tambah:	
transfer masuk	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>	<b>226,726,000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2023</b>	<b>226,726,000</b>

*Konstruksi*

*Dalam*

*Pengerjaan Rp*

*1.013.865.628*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.013.865.628 ,- dan Rp0,-.

<b>A. Saldo Awal</b>	<b>-</b>
<b>B. Mutasi Tambah</b>	
- Perolehan/Penambahan KDP	1,013,865,628
- Pengembangan KDP	
<b>C. Mutasi Kurang</b>	
<b>D. Saldo Akhir</b>	<b>1,013,865,628</b>

Penjelasan mutasi penambahan atas nilai Konstruksi Dalam pengerjaan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Konstruksi Dalam pengerjaan senilai Rp1.013.865.628,- berasal dari:

NO	SPM		PENGGUNAAN	NILAI
	NOMER	TANGGAL		
1	00060	27-02-2023	Konsultan Perencana Pembangunan Pagar Besi	11,664,476
2	00061	27-02-2023	Konsultan Perencana Pembangunan Tempat Parkir Roda 2 dan 4 Kantor Pelayanan Terpadu	14,417,817
3	00062	28-02-2023	Konsultan Perencana Pembangunan Taman Kantor Pelayanan Terpadu	14,652,135
4	00063	28-02-2023	Konsultan Perencana Pembangunan Pagar Alas Kantor Pelayanan Terpadu Berdasarkan	21,425,707
	00109	28-03-2023	GUP	77,285,914
	00172	02-05-2023	Konsultan Perencana Peningkatan Gedung Pelayanan Terpadu Sesuai Kontrak B.1636/PPN.PGB/KP.440/III/2023 Tgl 31 Mart 23	13,693,609
	00210	12-05-2023	GUP	3,680,000
	00227	24-05-2023	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pagar Alas Kantor Pelayanan Terpadu Untuk 3 Orang Berdasarkan SK Nomor 37/KPA/OT.210/I/2023 Tanggal 5 Januari 2 023	2,550,000
	00229	24-05-2023	Pembangunan Pagar Besi Kantor Pelayanan Terpadu sesuai Kontrak B.1522/PPN.PGB/KP.440/III/2023 Tgl 24 Maret 23	156,140,450
	00238	30-05-2023	GUP	1,542,000
	00309	27-06-2023	PTUP	217,383,102
	00245	05-06-2023	Pembangunan Tempat Parkir Roda 2 dan 4 Kantor Pelayanan Terpadu Sesuai Kontrak B.1481/PPN.PGB/KP.440/III/2023 Tgl 20 Maret 23	199,099,717
	00246	05-06-2023	Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir Roda 2 dan 4 Kantor Pelayanan Terpadu Sesuai Kontrak B.1503/PPN.PGB/KP.440/III/23 Tgl 20 Maret 23	9,762,000
	00247	05-06-2023	Pengawasan Pembangunan Pagar Besi Kantor Pelayanan Terpadu Sesuai Kontrak B.1535/PPN.PGB/KP.440/III/2023 Tgl 24 Maret 2023	7,670,000
	00293	19-06-2023	Uang Muka Pembangunan Pagar Alas Kantor Pelayanan Terpadu sesuai Kontrak B.2415/PPN.PGB/KS.320/V/2023 Tgl 26 Mei 2023	61,800,000
	00302	22-06-2023	GUP	180,819,871
	00329	06-07-2023	GUP	20,278,830
<b>TOTAL</b>				<b>1,013,865,628</b>

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
(Rp101.341.239.66  
7)*

### C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp 101.341.239.667,- dan Rp 99.371.046.213,- . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023

adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	15,445,269,286	13,431,864,133	2,013,405,153
2	Gedung dan Bangunan	20,350,241,573	1,515,098,106	18,835,143,467
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	131,624,628,671	86,216,325,428	45,408,303,243
4	Aset Tetap Yg Tdk Digunakan	22,614,194,000	22,251,453,096	362,740,904
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>190,034,333,530</b>	<b>123,414,740,763</b>	<b>66,619,592,767</b>

**C.21 Aset Tak Berwujud**

*Aset Tak Berwujud Rp0*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 Juni 2021</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2021</b>	-

*Aset Lain-Lain Rp 22.492.189.000*

**C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp 22.492.189.000,- dan Rp 22.448.391.000,- . Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	22,448,391,000
Mutasi tambah:	43,798,000
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2022	22,492,189,000
Akumulasi Penyusutan	(22,447,735,125)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	44,453,875

Mutasi Tambah atas nilai Aset Lainnya senilai Rp 43.798.000,- berasal dari :

Proses Penghapusan sesuai dengan surat usulan penghapusan BMN Nomor B.4212/PPN.PGB/PL.750/XI/2022 tanggal 24 November 2022 (Eselon I) berupa :

- 1 Unit Sepeda Motor Roda Tiga senilai Rp.15.500.000
- 1 Unit Bangunan MCK senilai Rp. 28.298.000

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
(Rp22.251.453.0  
96)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Devisit masing-masing (Rp 22.251.453.096,-) dan (Rp 54.743.101,-) . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Komputer Unit	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain	617,815,000	(54,743,101)	563,071,899
<b>Jumlah</b>	<b>617,815,000</b>	<b>(54,743,101)</b>	<b>563,071,899</b>

## **C.24 Uang Muka dari KPPN**

*Uang Muka dari  
KPPN Rp  
248.517.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 248.517.000 dan Rp0 ,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp318713223*

## **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp318.713.223 dan Rp 30.329.136. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan  
yang  
Ditangguhkan  
Rp0*

## **C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan**

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potong pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2018.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan*

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNPB	-
PPH yang belum disetor	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp218.920.932*

### **C.27 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 218.920.932,- dan Rp170.259.732,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari sewa lahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengguna (Badan Usaha/Perorangan/Instansi)	Tanah Yang Digunakan (m2)	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	Jangka Waktu (th)	Mulai	Berakhir
1	PT. Cilacap Samudra Fishing Industry (PT. CSFI)	25,000	360,000,000	4257/DPT.3/PL.210.D3/IX/2006	27-Sep-06	20	27-Sep-06	26-Sep-26
2	H. ALI NURI	780	7,020,000	3208/PPN.Pgb/PL.210/XII/2020	17-Dec-20	3	17-Dec-20	16-Dec-23
3	PT. SARANA TANI PRATAMA	8033,03	157,644,000	84/PPN.Pgb/PL.321/II/2021	14-Jan-21	5	14-Jan-21	13-Jan-26
4	PT. ASTA BUANA ENERGI PERKASA	720	44,850,000	B. 4609/PPN.PG B/PL.210/XII/2022	20 Des 2022	5	20 Des 2022	19 Des 2027

Dari semua pengguna lahan tersebut telah membayarkan jasanya dengan rincian sebagai berikut :

- H. Ali Nuri pada tanggal 5 Januari 2021 dengan NTPN D31611JNF2OC4HN7
- PT Sarana Tani Pratama pada tanggal 5 Maret 2021 dengan NTPN 4ACB16U8E2CIQAUF
- PT Asta Buana Energi Perkasa pada tanggal 2 Januari 2023 dengan NTPN 2E37848VV53G1R2Q
-

### Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
Sewa Lahan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry	73,333,332
Sewa Lahan H. Ali Nuri	2,340,000
Sewa Lahan PT. Sarana Tani Pratama	94,586,400
Sewa Lahan PT. Asta Buana Energi Perkasa	44,850,000
Pemeliharaan Lahan PT. Asta Buana Energi Perkasa	3,811,200
<b>Total</b>	<b>218,920,932</b>

*Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0*

### C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Ekuitas Rp 114.816.512.774*

### C. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 114.816.512.774,- dan Rp 114.347.484.191,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan*

*PNBP*

*Rp183.342.354*

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 183.342.354,- dan Rp 587.032.147,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah,gedung,da Bangunan	0	0	0.00
Pendapatan Pemanfaatan BMN Lainnya	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penggunaan Saranadan Praarana sesuai dengan Tusi	11,512,130	337,217,511	-2829.24
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	194,854,480	249,814,636	-28.21
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>183,342,350</b>	<b>587,032,147</b>	<b>-220.18</b>

Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari tambat labuh, pas masuk dan jasa kebersihan pelabuhan.

*Beban Pegawai*

*Rp 2.717.122.125*

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.717.122.125,- dan Rp 2.532.142.380,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1,091,898,520	1,041,851,460	4.58
Beban Tunjangan-tunjangan	1,610,030,605	1,478,665,920	8.16
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0.00
Beban Lembur	15,193,000	11,625,000	23.48
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2,717,122,125</b>	<b>2,532,142,380</b>	<b>6.81</b>

*Beban  
Persediaan Rp  
19.513.970*

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 19.513.970,- dan Rp 12.369.750,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	19,513,970	12,369,750	
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0.00
Beban Persediaan Suku Cadang			0.00
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0.00
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>19,513,970</b>	<b>12,369,750</b>	<b>36.61</b>

*Beban Barang  
dan Jasa Rp  
2.661.222.392*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.661.222.392,- dan Rp 2.110.030.379,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul

karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	1,235,599,476	1,054,261,220	14.68
Beban Langganan Daya dan Jasa	129,917,767	327,752,650	-152.28
Beban Jasa Pos dan Giro	716,000	607,725	15.12
Beban Jasa Konsultan	0	0	0.00
Beban Jasa Profesi	18,900,000	21,600,000	0.00
Beban Jasa Lainnya	1,276,089,149	665,502,284	0.00
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	0	40,306,500	
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>2,661,222,392</b>	<b>2,110,030,379</b>	<b>20.71</b>

*Beban Pemeliharaan Rp 422.259.617*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 422.259.617,- dan Rp 378.860.953,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	160,286,615	55,165,782	65.58
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	194,197,093	222,649,049	-14.65
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	16,004,000	26,616,000	0.00
Beban Pemeliharaan Irigasi	11,122,700	28,351,622	0.00
Beban Pemeliharaan Jaringan	40,649,209	46,078,500	0.00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			
Beban Persediaan Suku Cadang	0		0.00
<b>Jumlah</b>	<b>422,259,617</b>	<b>378,860,953</b>	<b>10.28</b>

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp160.286.615,- berupa pemeliharaan gedung permanen,

bangunan TPI permanen serta tempat parkir. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp194.197.093,- berupa eksploitasi dump truck, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan peralatan kantor. Pemeliharaan Jaringan senilai Rp60.649.209,- berupa pemeliharaan jaringan air dan listrik.

*Beban  
Perjalanan  
Dinas Rp  
887.332.758*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 887.332.758,- dan Rp 432.100.047,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	729,335,011	318,752,340	56.30
Beban Perjalanan Tetap		0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	600,000	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	134,750,000	59,550,000	55.81
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22,947,747	53,197,707	-131.82
<b>Jumlah</b>	<b>887,332,758</b>	<b>432,100,047</b>	<b>51.30</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2017.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban Bantuan Sosial Rp0* **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 20120	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0* **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 11.996.952.392,-.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,109,497,069	2,164,110,379	-2.5
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	154,865,190	160,737,073	-3.6
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	9,856,307,243	9,856,307,240	0.0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7,820,443	9,763,099	-20.0
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>12,128,489,945</b>	<b>12,190,917,791</b>	-0.5
			0.0
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	0.0
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0.0
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>12,128,489,945</b>	<b>12,190,917,791</b>	<b>(0.5)</b>

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp3.328,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	(3,328)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>(3,328)</b>	<b>-</b>

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp89790673*

#### **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing Rp89.790.673,- dan Rp557.175.432,-. Rincian kegiatan non operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	0	0	-
Defisit Selisih Kurs	0	0	-
Surplus Defisit kegiatan Non Operasional lainnya	89,790,673	557,175,432	
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>89,790,673</b>	<b>557,175,432</b>	<b>-83.88</b>

*Pos Luar Biasa* **D.13 Pos Luar Biasa**

*Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### *Ekuitas Awal*

*Rp114.347.484.19*

*1*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp114.347.484.191,- dan Rp 131.476.157.703,-

### *Defisit LO*

*Rp6.434.015.493*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp6.434.015.493,- dan Rp16.318.248.322,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### *Koreksi Nilai*

*Persediaan Rp0*

### **E.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

<b>Jenis Persediaan</b>	<b>Koreksi</b>
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

### *Koreksi Atas*

*Reklasifikasi*

*Rp0*

### **E.4 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Koreksi	Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Nilai  
Aset Tetap Rp0*

**E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap**

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap*

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Koreksi Nilai Saldo Awal	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Atas  
Beban Rp0*

**E.6 Koreksi Atas Beban**

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas beban untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Atas Beban*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	-
Beban Jasa	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Atas  
Pendapatan  
Rp0*

### **E.7 Koreksi Atas Pendapatan**

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi tambah atas Pendapatan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Koreksi Atas Pendapatan*

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Hibah  
Masuk/ Keluar  
Rp0*

### **E.8 Koreksi Hibah Masuk/Keluar**

Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Hibah Masuk/Keluar untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Nilai Koreksi Hibah Masuk/Keluar*

Jenis Koreksi	Koreksi
Hibah Peralatan dan Mesin	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Ekuitas Akhir  
Rp114.816.512.77  
4*

### **E.9 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 114.816.512.774,- dan Rp 120.491.180.568,-.

#### **A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

Merebaknya pandemic Corona pada awal tahun 2023, berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk pada kebijakan pemerintah. Di bidang keuangan berdampak pada pemotongan anggaran untuk penanganan pandemic. PPN Pengambengan mengalokasikan belanja untuk penanganan Pandemi Corona diantaranya untuk belanja barang berupa vitamin, desinfektan, hand soap dan alat pelindung diri.

Koreksi nilai aset non revaluasi senilai Rp55544613,- merupakan kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan gedung pelayanan terpadu tahap 2 berdasarkan bukti setor NTPN 2D2752G4QALFQ Tanggal 10 Mei 2023

Terdapat Hasil Temuan BPK pada TA 2022 berupa tidak tertibnya penatausahaan PNBK jasa pelabuhan pada PPN Pengambengan.

Dari Hasil Temuan BPK TA 2022 tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagaimana terlampir.





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN**

JALAN PELABUHAN NO. 1 PENGAMBENGAN KEC. NEGARA,  
KAB. JEMBRANA - BALI KODE POS 82251  
TELEPON (0365) 42968, 41542, 43303, FAKSIMILI (0751) 751122

Laman <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan> E-mail [ppn.pengambengan@kkp.go.id](mailto:ppn.pengambengan@kkp.go.id)

**Penatausahaan PNBP Jasa Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Tidak Tertib**

Kami sependapat dengan temuan BPK yang berjudul **Penatausahaan PNBP Jasa Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Tidak Tertib**. Selanjutnya kami akan membuat Surat Teguran Kepada Syahbandar PPN Pengambengan agar meningkatkan pengawasan atas kepatuhan seluruh aktivitas kedatangan, tambat/labuh, dan keberangkatan kapal di kolam tambat/labuh PPN Pengambengan. Namun untuk menggunakan Aplikasi SIJAKA kami masih terkendala dengan Penerbitan SPB dikarenakan Kapal yang belum mempunyai SIPI. Kendala Penerbitan SPB terlampir.

Pengambengan, 6 April 2023

Kepala Pelabuhan



**Andi Mannojengi, S.St.Pi, M.Si**

NIP. 19750417 200212 1 002







**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN**

JALAN PELABUHAN NO. 1 PENGAMBENGAN KEC. NEGARA,  
KAB. JEMBRANA - BALI KODE POS 82251  
TELEPON (0365) 42968, Ext.1

Laman <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan> E-mail [ppn.pengambengan@kkp.go.id](mailto:ppn.pengambengan@kkp.go.id)

Nomor : B.1743/PPN.PGB/KP.820/IV/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Teguran

12 April 2023

**Yth. Ketua Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran  
PPN Pengambengan  
di  
Tempat**

Sehubungan dengan Surat Nomor : 20/LKKKP 20224/2023 perihal penyampaian konsep temuan pemeriksaan Tahap IV oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Telah ditemukan Penatausahaan PNPB Jasa Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Tidak Tertib. Berkaitan dengan hal tersebut dimohon agar saudara melakukan pengawasan atas kepatuhan seluruh aktivitas kedatangan, tambat/labuh, dan keberangkatan kapal di kolam tambat/labuh PPN Pengambengan dan melakukan rekonsiliasi dengan Ketua Sub Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (TKPU).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,  
  
Andi Mannojengi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN**

JALAN PELABUHAN NO. 1 PENGAMBENGAN KEC. NEGARA,  
KAB. JEMBRANA - BALI KODE POS 82251  
TELEPON (0365) 42968, 41542, 43303, FAKSIMILI (0751) 751122

Laman <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan> E-mail [ppn.pengambengan@kkp.go.id](mailto:ppn.pengambengan@kkp.go.id)

**Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Tahap II pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan tidak sesuai kontrak sebesar Rp. 55.544.613,00**

Kami sependapat dengan temuan BPK yang berjudul **Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Tahap II** Belanja Modal pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp. 55.544.613,00. Setelah kami koordinasi dengan Pihak Penyedia, Pihak Penyedia sanggup menyetorkan ke kas negara dengan batas waktu sampai berakhirnya masa Pemeliharaan. Selanjutnya akan kami sampaikan bukti tersebut sebagai bahan tindak lanjut.

Jakarta, 3 April 2023

Kepala Pelabuhan



**Andi Mannojengi, S.St.Pi, M.Si**

NIP. 19750417 200212 1 002

438018148

TANDA TERIMA  
Setoran Pajak (PPN Billing)

Tanggal : 10-05-2023 13:30:12

No.Resi : 81100-04/2023/810109 Petugas : 550008960

Tanggal Buku : 11-05-2023

NTP : 943746283196

Kode Cabang Pos : 081100

NTFN : 20275264VGADALFU

STAN : 283196

Waktu Transaksi : 10-05-2023 13:30:09

Kode Billing : 820230508533242

Nama Wajib Bayar: Bendahara Penerimaan

K / L : 032

Unit Eselon : 03

Kode Satker : 633693

Jumlah Setoran : Rp. 55.544.613 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah)

NWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia



KANTOR POS





## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230508533242
Tanggal Billing	: 08-05-2023 13:02:29
Tanggal Kedaluwarsa	: 15-05-2023 13:02:29
Tanggal Bayar	: 10-05-2023 13:30:09
Bank/Pos/Fintech Bayar	: POS INDONESIA
Channel Bayar	: <i>Teller</i>
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga	: <b>032</b> - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I	: <b>03</b> - Ditjen Perikanan Tangkap
Satuan Kerja	: <b>633693</b> - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN
Total Disetor	: 55.544.613 (IDR)
Terbilang	: <i>Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Belas (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
<b>NTB</b>	: <b>943746283196</b>
<b>NTPN</b>	: <b>2D2752G4VGAQALFQ</b>

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 55.544.613 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Gedung pelayanan Terpadu Tahap II Pada PPN Pengambengan atas nama CV, Putra Catur Dewata



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN**

JALAN PELABUHAN NO. 1 PENGAMBENGAN KEC. NEGARA,  
KAB. JEMBRANA - BALI KODE POS 82251  
TELEPON (0365) 42968, 41542, 43303, FAKSIMILI (0751) 751122

Laman <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan> E-mail [ppn.pengambengan@kkp.go.id](mailto:ppn.pengambengan@kkp.go.id)

**Belanja Bahan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya**

Kami sependapat dengan Konsep temuan BPK yang berjudul **Belanja Bahan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya**. Yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Barang senilai Rp. 90.001.000,-. Namun dari nilai tersebut terdapat pengeluaran real sebesar Rp. 68.463.940,- sehingga masih ada selisih senilai Rp. 21.537.060,-. Data dalam bentuk soft copy sudah disampaikan ke tim BPK dan selanjutnya kami akan segera menyetorkan selisih nilai ke kas negara.

Pengambengan, 14 April 2023

Kepala Pelabuhan



**Andi Mannoengi, S.St.Pi, M.Si**  
NIP. 19750417 200212 1 002

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	--	-------------------------

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar : 17/04/2023 12:38:26 NTB : 230417011829  
 Tanggal Buku : 17/04/2023 NTPN : 7120D6U8EL41R0IN  
 Kode Cab. Bank : 0125 STAN : 191875

Data Setoran:

Kode Billing : 820230417810007  
 Nama Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan  
 Kementerian/Lembaga : 032  
 Unit Eselon I : 03  
 Satuan Kerja : 633693  
 Jumlah Setoran : Rp. 21,537,060.00 Mata Uang : IDR  
 Terbilang : DUA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU  
 ENAM PULUH RUPIAH

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank

Bendahara Penerimaan 0000 0000 21537060.00 17042023 17042023 7120D6U8EL41R0IN  
 230417011829 191875 139



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN**

JALAN PELABUHAN NO. 1 PENGAMBENGAN KEC. NEGARA,  
KAB. JEMBRANA - BALI KODE POS 82251  
TELEPON (0365) 42968, 41542, 43303, FAKSIMILI (0751) 751122

Laman <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan> E-mail [ppn.pengambengan@kkp.go.id](mailto:ppn.pengambengan@kkp.go.id)

**Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada PPN Pengambengan Tidak Sesuai PMK tentang Standar Biaya Masukkan sebesar Rp. 16.644.000,00**

Kami sependapat dengan temuan BPK yang berjudul **Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada PPN Pengambengan Tidak Sesuai PMK tentang Standar Biaya Masukkan sebesar Rp. 16.644.000,00**. Selanjutnya kami akan membuat Surat Teguran Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran PPN Pengambengan serta mengintruksikan kepada PPK agar segera menyetorkan ke kas negara baik di setor sekaligus maupun diangsur. Kami sampaikan bukti tersebut sebagai bahan tindak lanjut.

Pengambengan, 6 April 2023

Kepala Pelabuhan



**Andi Mannojengi, S.St.Pi, M.Si**

NIP. 19750417 200212 1 002



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN**

JALAN PELABUHAN NO. 1 PENGAMBENGAN KEC. NEGARA,  
KAB. JEMBRANA - BALI KODE POS 82251  
TELEPON (0365) 42968, Ext.1

Laman <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan> E-mail [ppn.pengambengan@kkp.go.id](mailto:ppn.pengambengan@kkp.go.id)

Nomor : B.1740/PPN.PGB/TU.210/IV/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Surat Tagihan

12 April 2023

**Yth. Dendy Umbara Hadi, S.Pi**  
**Pejabat Pembuat Komitmen T.A 2022**  
**di**  
**Tempat**

Sehubungan dengan Surat Nomor : 20/LKKKP 20224/2023 perihal penyampaian konsep temuan pemeriksaan Tahap IV oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Telah ditemukan Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada PPN Pengambengan Tidak Sesuai PMK tentang Standar Biaya Masukan sebesar **Rp. 16.644.000,00**. Berkaitan dengan hal tersebut dimohon agar Saudari segera menyetorkan ke Kas Negara dengan kode Billing (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,  
  
Andi Mannoengi

TANDA TERIMA  
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 04-05-2023 10:46:32

No. Resi : 82200-24/2023/810093      Petugas : 550003068

Tanggal Buku : 04-05-2023

NIP : 928204213749

Kode Cabang Pos : 081100

NIPN : 246571JHFL09MDGL

STAN : 213749

Waktu Transaksi : 04-05-2023 10:46:29

Kode Billing : 820230504112981

Nama Wajib Bayar: Bendahara Penerimaan

K / L : 032

Unit Eselon : 03

Kode Satker : 633693

Jumlah Setoran : Rp. 16.644.000      Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

NPNP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTOR POS





### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230504112981  
Tanggal Billing : 04-05-2023 10:12:06  
Tanggal Kedaluwarsa : 11-05-2023 10:12:06  
Tanggal Bayar : 04-05-2023 10:46:29  
Bank/Pos/Fintech Bayar : POS INDONESIA  
Channel Bayar : Teller  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan  
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Eselon I : **03** - Ditjen Perikanan Tangkap  
Satuan Kerja : **633693** - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN  
Total Disetor : 16.644.000 (IDR)  
Terbilang : *Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **928204213749**  
**NTPN** : **246571JNFLO9MOQL**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 16.644.000 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Barang berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen an. Dendy Umbara Hadi, SP selama 10 Bulan dari Priode Agustus 2021 s.d Mei 2022.



37	SINAR PERMATA	RADEN ANDI SUYANTO	301,722	Tdk ada keg	169,440	456,660	91,640	Tdk ada keg	Tdk ada keg	Tdk ada keg	Tdk ada keg	Tdk ada keg	2,388,980	12,300	Tdk ada keg	3,420,742
		RADEN ANDI SUYANTO														
38	SINAR MUTIARA	RADEN ABU SUPIAN	308,133	167,460	585,365	585,365	362,095	462,000	494,285	517,650	466,285	523,650	448,190	326,730	436,825	5,684,033
		RADEN ABU SUPIAN														
39	SINAR INTAN	RADEN ABU SUPIAN	201,733	439,890	215,890	540,000	462,890	445,500	351,000	459,000	508,255	443,670	391,500	Tdk ada keg	696,390	5,155,718
		RADEN ABU SUPIAN														
40	SINAR BERLIAN		264,704	102,195	531,395	Tdk ada keg	Tdk ada keg	76,790	153,580	619,785	Tdk ada keg	1,748,449				
41	SINAR SAMUDRA	MUSAWIR	7,742,842	Tdk ada keg	245,250	Tdk ada keg	Tdk ada keg	Tdk ada keg	-	Tdk ada keg	Tdk ada keg	Tdk ada keg	Tdk ada keg	Tdk ada keg	Tdk ada keg	7,988,092
		MUSAWIR														
42	SINAR BANGKIT	I KETUT DASTRA	-	LUNAS	Tdk ada keg	LUNAS	Tdk ada keg	LUNAS	LUNAS	Tdk ada keg	Tdk ada keg	LUNAS				
		I KETUT DASTRA														
43	BARU BAROKAH	FIRDAUS	LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS	lunas	496,538	748,325	1,244,863
		FIRDAUS														
44	RISKI MUBAROK	NURHAKIM	-	LUNAS	LUNAS	60,205	337,920	456,035	258,120							
		NURHAKIM														
45	KOTA JAYA/AMANAH	MIFTA SURGANA	-	LUNAS	LUNAS	LUNAS	530,100	297,550	827,650							
		MIFTA SURGANA														
46	SUMBER BUNGA/SMBR REJEKI	NURUDIN	-	LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS		740,775	119,225	707,025	391,200	376,850	302,225	2,637,300
		NURUDIN														
47	SUMBER TENANG/SB MUNCUL	RONI	-	3,289,313	2,858,388	Tdk ada keg	Tdk ada keg	280,163	451,800	Tdk ada keg	3,204,940	46,490	347,860	460,515	414,025	11,353,493
		RONI														
48	PUTRA BAGUS	Ir. Kt SUASTIKA YASA	-						LUNAS	LUNAS	Tdk ada keg	LUNAS	TDK ADA KEG	TDK ADA KEG	TDK ADA KEG	-
		Ir. Kt SUASTIKA YASA														
49	ABABIL ISTAMBUL		LUNAS										Tdk ada kegiatan	Tdk ada kegiatan	Tdk ada kegiatan	Tdk ada kegiatan
50	BINTANG DIRHAM	SOBIRIN	2,172,445			3,554,465							Tdk ada kegiatan	Tdk ada kegiatan	Tdk ada kegiatan	Tdk ada kegiatan
		SOBIRIN														
51	KALI SARI	Putu Ari'i KETUT DASTRA							LUNAS	Tdk ada keg	Tdk ada kegiatan	-				
		Putu Ari'i KETUT DASTRA														
52	PRATIWI	H. YAHYA								18,025	47,600	248,125	Tdk ada kegiatan	Tdk ada kegiatan	Tdk ada kegiatan	313,750
		H. YAHYA														
53	DMJ 4	PAP SAMUDRA FISHING INDUSTRY								LUNAS	Tdk ada kegiatan		Tdk ada kegiatan	Tdk ada kegiatan	Tdk ada kegiatan	-
54	SMJ 4											LUNAS	Tdk ada kegiatan	Tdk ada kegiatan	Tdk ada kegiatan	-
55	SINAR BHAHARI	AHMAD NURIYADI								LUNAS	LUNAS	LUNAS	248,400	276,600	525,000	
		AHMAD NURIYADI														
56	LUCKY JAYA KARYA											LUNAS				-
57	MALUKU JAYA KARYA									LUNAS	LUNAS	LUNAS	Tdk ada kegiatan			-
	SISA YG BLM DI BAYAR		20,277,981	7,570,301	21,402,843	14,426,335	1,521,308	7,110,126	3,801,443	7,347,003	6,720,613	3,593,488	6,672,170	7,125,268	8,523,673	116,092,548

Subkor TKPU,  
  
 Erlina Efendi